

Etika Otonomi dalam Membuat Keputusan Medis menurut Teori Kantian

I Gede Eka Agung Agastya Punia^{1,2}, Pukovisa Prawiroharjo²

¹Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Denpasar

²Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Depok

Kata Kunci

bioetika, Immanuel Kant, imperatif kategoris, informed consent, otonomi

Korespondensi

agastya@unmas.ac.id

Publikasi

© 2026 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v10i3.110

Tanggal masuk: 4 Mei 2026

Tanggal ditelaah: 5 Juni 2026

Tanggal diterima: 4 Juli 2026

Tanggal publikasi: 5 Agustus 2026

Abstrak Prinsip autonomy (otonomi) merupakan salah satu pilar utama bioetika kedokteran modern yang diwujudkan melalui proses informed consent. Namun, implementasi otonomi sering kali menghadapi kerentanan akibat faktor empiris. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kehendak bebas pasien benar-benar bersifat otonom ketika kapasitas rasionalnya terganggu, serta seberapa besar risiko pengorbanan otonomi individu demi pertimbangan utilitarian. Teori Kantian memberikan penjelasan tentang konsep ini. Menurut Kant, otonomi bukan sekadar kebebasan memilih melainkan kapasitas rasional manusia untuk bertindak berdasarkan imperatif kategoris dan prinsip moral universal. Menurut Kant, manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sarana semata. Pendekatan Kantian ini menawarkan kerangka etis yang kokoh untuk menangani kasus pasien tidak cakap, dengan menekankan representasi kehendak rasional melalui keluarga atau wali tanpa mengabaikan martabat manusia.

Abstract The principle of autonomy is a cornerstone of modern medical bioethics, realized through the process of informed consent. However, the implementation of autonomy is often rendered vulnerable by empirical factors. This situation raises fundamental questions regarding the extent to which a patient's free will is truly autonomous when their rational capacity is impaired, as well as the risk of sacrificing individual autonomy for utilitarian considerations. Kantian theory explains this concept. According to Kant, autonomy is not merely the freedom to choose but the human rational capacity to act in accordance with the categorical imperative and universal moral principles. Kant posits that human beings must always be treated as ends in themselves, never merely as means. This Kantian approach provides a robust ethical framework for addressing cases involving patients lacking decision-making capacity, emphasizing the representation of rational will through family members or guardians without compromising human dignity.

Salah satu komponen dari bioetika kedokteran adalah otonomi.¹ Konsep otonomi memiliki permasalahan yang disebabkan oleh kondisi patologis, tekanan psikologis, dan keterbatasan informasi yang sering mengaburkan kapasitas pasien atau keluarga pasien dalam mengambil sebuah keputusan yang otonom. Secara umum, prinsip otonomi dalam kedokteran modern direalisasikan melalui proses *informed consent*, yakni proses komunikasi etis antara pasien dengan tenaga kesehatan yang membicarakan diagnosis, jenis tindakan yang dilakukan, risiko dan manfaatnya, alternatif dari terapi, hingga akibatnya apabila tidak dilakukan. Dari *informed consent*, diharapkan pasien memahami informasi tersebut dan secara sukarela menyetujui atau menolak tindakan

medis.² Akan tetapi, permasalahan seperti (1) penyakit serebrovaskular dengan pemahaman informasi yang diterima pada saat *informed consent* dari pasien dan keluarganya³ atau (2) *do-not-resuscitate* (DNR) dan eutanasia pasif.⁴ Keterbatasan ini menimbulkan pertanyaan, yakni sejauh mana kehendak bebas pasien benar-benar otonom?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu kembali kepada hakikat otonomi itu sendiri. Otonomi adalah sebuah landasan dari konsep *informed consent* yang membuktikan bahwa pasien telah menerima informasi yang cukup untuk membuat keputusan secara berdaya penuh dan sadar.¹ Akan tetapi, keterbatasan seperti gangguan kognitif atau tekanan eksternal dari tenaga medis ataupun

keluarga sering membuat otonomi ini rapuh, yang berakhir pada ketidakpastian etika. Dalam mempelajari kerapuhan otonomi pasien akibat gangguan kognitif atau tekanan eksternal, terkadang pada akhirnya pasien melakukan pendekatan utilitarian atau konsekuensial, sering kali untuk mengorbankan otonomi individu demi manfaat yang lebih besar. Hal ini membuat *informed consent* menjadi sebuah formalitas prosedural. Oleh karena itu, kita perlu memahami makna otonomi bukan hanya secara ontologis, dalam hal ini otonomi sebagai esensi bawaan manusia sebagai makhluk rasional yang bebas dari determinisme alamiah, akan tetapi juga secara epistemologis, yaitu bagaimana pengetahuan tentang kehendak bebas ini dapat diakses dan diakui dalam praktik medis.

Ketika otonomi menjadi rapuh akibat tekanan empiris, kita membutuhkan kompas moral yang tidak tergoyahkan oleh perhitungan utilitarianis. Salah satu filsuf yang menekankan makna otonomi adalah Immanuel Kant. Kant menegaskan bahwa otonomi bukan hanya kemampuan memilih, melainkan juga kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan hukum moral yang ia berikan pada dirinya sendiri melalui akal budi. Menurut Kant, manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan hanya sebagai alat.⁵ Penelitian ini akan menjawab pertanyaan fundamental terkait otonomi, terutama dari teori Immanuel Kant.

Otonomi Secara Kaidah Bioetika dan Permasalahannya

Bioetika merupakan landasan etika kedokteran yang memiliki titik awal dari hasil analisis tentang data biologis, ilmiah dan medis. Kajian bioetika mengacu kepada keabsahan campur tangan manusia dikaji berdasarkan etika.⁶ Menurut penjelasan oleh Beauchamp dan Childress, salah satu kaidah bioetika adalah otonomi. Menurut Beauchamp dan Childress, prinsip otonomi menjunjung tinggi hak-hak pasien sebagai manusia, terutama hak mereka untuk menentukan nasib perawatan mereka sendiri. Prinsip ini menegaskan pentingnya menghargai pilihan pasien, tidak hanya dalam mengetahui kondisi kesehatannya,

tetapi juga dalam menerima atau menolak terapi berdasarkan nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi pribadinya.¹

Kaidah otonomi dalam hal ini menekankan hak-hak pasien sebagai seorang manusia, terutama hak otonomi pasien. Otonomi menekankan bahwa pasien bukanlah objek medis, melainkan subjek yang memiliki martabat dan kebebasan. Secara operasional, prinsip ini mewajibkan tenaga medis untuk menghormati nilai-nilai, kepercayaan, dan pilihan hidup pasien, memberikan informasi yang jujur, akurat, dan lengkap agar pasien dapat membuat keputusan yang sadar, dan menghindari segala bentuk paksaan atau manipulasi dalam proses pengobatan.⁷ Otonomi terwujudkan di dalam *informed consent* yang merupakan manifestasi dari konsep otonomi. Etika ini menekankan bahwa setiap individu yang kompeten memiliki hak untuk mengambil keputusan tentang apa yang terjadi pada tubuhnya dan menerima atau menolak prosedur medis atau partisipasi dalam penelitian setelah memahami sepenuhnya risiko, manfaat, alternatif, dan konsekuensi yang terkait. Tanpa adanya *informed consent* yang sah, otonomi individu tidak dihormati dan tindakan medis atau penelitian dapat dianggap tidak etis atau bahkan ilegal.⁸

Akan tetapi, otonomi amat sering mengalami masalah. Contohnya, pada pasien dengan penyakit serebrovaskular/stroke yang mengalami penurunan kognitif sehingga dianggap tidak cakap secara hukum atau dalam kasus keluarga yang meminta DNR serta eutanasia pasif bagi pasien yang tidak sadarkan diri di ICU. Jika merujuk pada inti otonomi bahwa pasien adalah subjek yang bermartabat, maka apakah pengalihan pengambilan keputusan kepada pihak ketiga secara otomatis mereduksi martabat pasien sebagai manusia? Sejauh mana kebebasan individu tetap ada ketika kapasitas rasionalnya memudar di persimpangan antara hidup dan mati?

Teori Kant Terkait Otonomi

Immanuel Kant merupakan salah satu filsuf yang memiliki pemikiran tentang kebebasan. Menurut pandangan Kant, konsep moral berpusat pada otonomi individu. Otonomi

ini merupakan sebuah inti dari kebebasan. Kebebasan tidak berarti kemampuan bertindak sesuka hati, akan tetapi kebebasan merupakan kemampuan untuk bertindak sesuai hukum moral yang ditentukan oleh rasionalitas (pikiran). Kebebasan sejati harus selaras dengan kewajiban moral yang dibentuk oleh akal sehat. Tindakan moral harus didasarkan kepada prinsip yang berlaku secara universal. Tindakan yang bermoral adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa melanggar prinsip moral yang sama.⁹

Inti dari pemikiran Kant mengenai otonomi terletak pada konsep imperatif kategoris. Imperatif kategoris merupakan sebuah konsep yang menuntut setiap individu untuk bertindak hanya berdasarkan maksim/prinsip subjektif yang dapat dikehendaki menjadi hukum universal. Dalam pelayanan medis, otonomi adalah sebuah kapasitas rasional pasien untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum moral yang objektif, bukan berarti pasien bebas memilih tanpa landasan rasional. Kant menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri dan tidak pernah menjadi sarana atau alat.¹⁰

Etika otonomi dalam keputusan medis menurut teori Kant adalah kapasitas rasional seorang individu untuk menentukan tindakan berdasarkan prinsip moral universal. Otonomi tidaklah hak untuk memilih atau bertindak sesuka hati. Seluruh tindakan medis yang bermoral harus dilandasi oleh imperatif kategoris. Penerapan teori Kant dalam dunia medis berarti pasien harus memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri berdasarkan hukum moral yang objektif, sehingga setiap keputusan medis yang diambil harus memenuhi prinsip bahwa manusia adalah tujuan bagi dirinya sendiri, bukan menjadi alat.¹¹

Akan tetapi, saat pasien tidak cakap atau tidak mampu memberikan *informed consent*, teori Kant menghadapi tantangan serius. Menurut Kant, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, tidak hanya sebagai sarana semata, sehingga setiap tindakan medis harus mempertimbangkan martabat dan kehendak rasional dari pasien. Kant juga

menangani peranan keluarga atau wali yang dapat mewakili kehendak rasional pasien, akan tetapi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar prinsip moral universal. Pada kasus pasien yang tidak cakap, teori Kant menuntut adanya prosedur etis yang memastikan keputusan medis tetap didasarkan pada prinsip otonomi dan moral universal dan melibatkan pihak yang dapat mewakili kehendak rasional pasien tanpa mengabaikan martabatnya.

Gangguan otonomi dalam teori Kant banyak sekali. Salah satunya adalah ketika dokter menjelaskan kepada pasien di unit gawat darurat bahwa pasien ini perlu tindakan. Proses penjelasan dokter tersebut sebenarnya tidak merusak otonomi. Kondisi kedaruratannya inilah yang menjadi penyebab gangguan otonomi pasien. Hal tersebut membuat pasien mengalami gangguan berpikir jernih dalam membuat keputusan bagi tubuhnya sendiri. Kant selalu menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Bila dokter memberikan informasi secara jujur demi membantu pasien mengambil keputusan, dokter tersebut sedang menghormati otonomi pasien. Akan tetapi, ketika dokter sengaja memanipulasi atau memanfaatkan kepanikan pasien untuk mengikuti kehendak dokter, tindakan dokter tersebut baru melanggar prinsip otonomi pasien menurut Immanuel Kant.

Contoh lainnya adalah keputusan *Do Not Resuscitate*. Menurut Kant, keputusan ini harus dilandaskan pada pertimbangan moral yang objektif dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tindakan ini tidak boleh berlandaskan keinginan sepihak dari dokter atau keluarga, permasalahan beban ekonomi, atau kalkulasi matematis atas rendahnya angka harapan hidup. Karena pasien sudah tidak mampu menyatakan kehendaknya, proses *informed consent* harus tetap dilakukan melalui perwakilan. Perwakilan ini bertugas memastikan keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai moral dan kehendak rasional pasien yang tidak dapat didikte oleh kepentingan pragmatis-utilitarianis pihak luar.¹²

KESIMPULAN

Implementasi prinsip otonomi yang sering terhambat oleh kondisi empiris menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kehendak pasien tetap otonom ketika kapasitas rasionalnya terganggu. Pendekatan Kantian menawarkan kompas moral dengan menekankan otonomi sebagai kapasitas rasional untuk bertindak sesuai imperatif kategoris, yakni prinsip moral universal yang menjunjung martabat manusia sebagai tujuan, bukan sarana. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan medis, terutama pada pasien yang tidak cakap, dapat diwakili oleh keluarga atau wali dengan tetap menghormati martabat dan kehendak rasional pasien tersebut sehingga tidak mengabaikan prinsip etis universal.

KONFLIK KEPENTINGAN

Tidak ada.

REFERENSI

1. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. 8th ed. Oxford: Oxford University Press; 2019.
2. Setiawan D, Sari R. Etika dan hukum dalam praktik kedokteran di era modern. J Bioetik Hukum Kesehat. 2021;6(2):67-75.
3. Ebrahimi H, Sadeghian E, Seyedfatemi N, Mohammadi E, Crowley M. Contextual factors affecting autonomy for patients in Iranian hospitals: a qualitative study. Iran J Nurs Midwifery Res. 2016;21:261-270. doi:10.4103/1735-9066.180388.
4. Kurnaesih E, dkk. Implementation of patient autonomy principle in end-of-life decision-making: a case study at KH. Daud Arif Regional General Hospital, Kuala Tungkal. J Eduhealth. 2024;15(4). doi:10.54209/eduhealth.v15i04.
5. Jilan S, dkk. Prinsip otonomi moral dalam filsafat hukum Immanuel Kant: analisis terhadap konsep kebebasan dan kewajiban. Praxis J Filsafat Terap. 2025;2(1):1-25. doi:10.11111.
6. Sundoro J, Setiabudy R. Etik penelitian kedokteran Indonesia. J Etika Kedokt Indones. 2022;6(1):15-23.
7. Pujiono E. Tanggung jawab hukum pidana pelanggaran otonomi pasien. J Huk Etika Kesehat. 2022;2(1).
8. Widjaja G, dkk. Kewajiban tenaga kesehatan dalam memberikan informed consent: kajian literatur etika dan hukum. Zahra J Health Med Res. 2025;5(2):1-11.
9. Rato D. Pengaruh teori Kant dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum universal. J Huk Pidana. 2023;1(2):34.
10. O'Neill O. Autonomy and trust in bioethics. Cambridge: Cambridge University Press; 2002.
11. Yusriyanto, dkk. Pemikiran Immanuel Kant tentang otonomi dan kebebasan: implikasi filosofis dalam pendidikan moral. J Midwifery Nurs Stud. 2025;7(1).
12. Campbell L. Kant, autonomy and bioethics. Ethics Med Public Health. 2017;3(3):381-392. doi:10.1016/j.jemep.2017.05.008.